

DEMOKRASI DAN PLURALISME

Oleh;

Rusdin Ahmad, S.Ag, M.Fil.I

M. Hidayat

Pendahuluan

Demokrasi dan Pluralisme dua terma memiliki makna berbeda namun mempunyai tujuan yang sama, demokrasi menginginkan keadilan, kebersamaan dan persamaan hak serta kewajiban sebagai warga negara, tidak melihat latar belakang, suku budaya dan kelompok serta pemahaman teologi. Sementara pluralisme memiliki perspektif keragaman atau plural dalam wacana keyakinan, budaya sebagai wujud *eksistensi* yang harus diasiasi secara *epistemologi* sehingga hubungan demokrasi dan pluralisme menjadi harmonis dalam kehidupan *multikultural*. Dalam wacana kenegaraan persoalan demokrasi dan pluralisme tidak bisa di hindari, sebab keduanya tumbuh dan berkembang secara alamiah (*natur*), sangat keliru jika dalam kelompok masyarakat memaksakan pemahamannya menjadi sebuah sistem yang kaku dan tidak memberikan peluang secara terbuka berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latarbelakang, maka melahirkan sikap skeptis, represif bahkan cenderung anarkis.

Sementara tuntutan demokrasi dalam tatanan masyarakat pluralisme menginginkan keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum dan HAM. Istilah demokrasi dan pluralisme, sebenarnya suda lama digelendirkan ditengah-tengah masyarakat modern, namun secara *ingklusif* masih memerlukan sebuah metode baru sebagai bentuk penyadaran komprehensif, sebab di dalam demokrasi dan pluralisme selalu diasumsikan sebagai manipulasi

kepentingan Barat, seperti diungkap puturolog, “seiring dengan terpolarisasinya berbagai negara ke dalam jaringan sistem kapitalisme global, muncul sebuah antitesa yang diungkapkan Samuel P. Huntington tentang masa depan pola hubungan internasional yang menunjukkan kecenderungan antagonistik yang diwarnai konflik. Secara tegas mengatakan, konflik itu semakin meningkat antara Islam dan masyarakat-masyarakat Asia di satu pihak dan Barat di pihak lain¹ artinya apapun yang dilakukan kaitannya dengan demokrasi kesimpulannya pasti kepentingan sepihak pada hal tidak mesti harus begitu, paradigma berpikir inilah harus diberikan pemahaman.

Proses demokrasi dalam wacana pluralisme, tentu tidak hanya lahir begitu saja meskipun selalu memiliki kepentingan, paling tidak kepentingan yang bersipat universal, yakni mengangkat martabat kemanusiaan, membangun keadilan, menghilangkan kesenjangan sosial dan sebagainya.

Demokrasi dan Pluralisme

1. Pemaknaan Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos* (rakyat) dan *kratein*” (memerintah), semula dalam politik pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang ditentukan orientasinya oleh rakyat sebagai lawan dari sistem pemerintahan yang untuk satu orang (monarki atau kelompok yang di istimewaakan, sekaligus lawan dari pemerintah tirani dan oligarki, hanya saja dalam perkembangan sistem politik

¹ Samuel P. Huntington, *Benturan Peradaban*, hlm. 333 [ustadzkholid.com/download-jian/download-ebook-ham-dalam-pandangan-Islam\(diakses 22 Oktober 1992\)](http://ustadzkholid.com/download-jian/download-ebook-ham-dalam-pandangan-Islam(diakses%2022%20Oktober%201992)), penulis kutip 8 Juni 2011.

demokrasi selalu mengalami perubahan se-iring dengan perkembangan manusia menuju pencarian kesempurnaan² Sementara dalam pandangan lain bahwa demokrasi berasal dari bahasa latin, *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan, selalu di asosiasikan sebagai suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat³ mencermati makna demokrasi, merupakan konsep kenegaraan yang berdasarkan kehendak dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, kebersamaan. Meskipun ada sebagian berpendapat bahwa demokrasi adalah proses menuju kesejahteraan masyarakat, secara menyeluruh. Olehnya itu tidak ada pilihan yang harus diciptakan secara serius dari semua kalangan, termasuk membentuk organisasi apapun yang berkomitmen mengembangkan nilai-nilai demokrasi⁴ maknanya bahwa setiap organisasi formal harusnya mampu memberikan keadilan dan kebebasan dalam berpendapat sebagai konsekwensi dari sebuah demokrasi.

Sementara dikalangan Intelektual Islam memiliki pandangan yang berbeda seperti Al-Maududi mengatakan. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk pemikiran Barat dan bertentangan terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Begitu juga Mohammad Iqbal, Demokrasi merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, namun disatu sisi telah mengabaikan keberadaan agama (*eksistensti of religions*), sehingga ia

² Loren Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 154-156

³ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta Darul Falah, 1999), h.228

⁴Wasid, *Gusdur Sang Guru Bangsa, Pergolakan Islam Kemanusiaan dan Kebangsaan*, (Yogyakarta, Interpena, 2010), h. 144

mengusulkan model demokrasi yang berlandaskan Aqidah. Sementara Yusuf al-Qardhawi, bahwa substansi demokrasi sejalan dengan Islam, dapat dilihat dari beberapa hal. **Pertama**, Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang (rakyat). **Kedua**, Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani (*otoriter*) juga sejalan dengan Islam. **Ketiga**, Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi mutlak dilaksanakan dan tidak mengenal golongan putih. **Keempat**, Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. **Kelima**, Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam⁵.

Wacana demokrasi di kaitkan dalam konteks modern tentu memerlukan pemahaman yang mendalam sebab kondisi yang dihadapi saat ini tidak hanya terfokus pada suatu kepentingan, melainkan seluruh aspek kehidupan. Maka pemahaman demokrasi yang terkait dengan pluralitas, sangat memerlukan *evistemologi*, sebagai bentuk berpikir secara adil dan jujur, sehingga keinginan rakyat dan pemimpin saling bersinergi, menguntungkan dan tidak terjadi diskriminasi, penindasan, pemerasan, perampasan, dan penggusuran hak-hak masyarakat (*civil society*) akibat pemahaman demokrasi yang bersifat oportunistik, sempit dan keliru.

2. Sejarah Demokrasi

Seperti dijelaskan Ahmad Suhelmi, bahwa istilah demokrasi dalam sejarah sebenarnya tidak bisa lepas dari

⁵ <http://www.com> *Demokrasi dalam Islam*, di akses 9 Maret 2012

persoalan-persoalan kekuasaan dizaman Yunani kuno⁶. Meskipun orientasinya hanya berkisar pada kebijakan interen penguasa. Istilah politik, kekuasaan, dan demokrasi merupakan konsep *evolitif* yang *dinamis*, yang selalu mengalami perubahan dan tidak statis, ini mengisyaratkan bahwa demokrasi selalu berubah, baik bentuk formalnya maupun substansinya hingga sesuai dengan perkembangan zaman.

Istilah demokrasi “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” serta penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat persamaan dimata hukum, kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan tujuan menginginkan kedamaian universal. Aristoteles dalam wacana pemikiran politik Yuanni kuno tampak jelas mengatakan bahwa rakyat adalah pilar utama sebagai tujuan demokrasi. Olehnya itu demokrasi tidak akan jalan apa bila rakyat terzalimi oleh penguasa.

Benjamin Constan (1819) menjelaskan bangsa Yunani kuno telah menemukan kemerdekaan politik mereka yang ganjil, sipil, publik yang tampaknya hanya tersedia bagi warga negara laki-laki⁷ keanehan dari kemerdekaan dalam pandangan ini, telah mendorong Aristoteles menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok sosial dan individu yang dinamakan warga negara (*citizen*) memiliki hak dan kewajiban yang sama. kelompok sosial minoritas dalam negara (*polis city state*) yang memiliki hak-hak

⁶ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat... h.*,230

⁷ Rowe & Schofield *Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi*, Cambridge University Press (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 11

istimewa dalam kehidupan politik Negara kota⁸ bahwa yang dimaksud adalah memiliki hubungan dekat atau kekerabatan dengan penguasa, sehingga hak dan kebebasan mereka selalu memiliki keterkaitan. Meskipun kedaulatan negara demokrasi sepenuhnya tergantung pada kehendak rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan, rakyatlah pemegang supermasi kekuasaan tertinggi.⁹

Perkembangan selanjutnya munculnya istilah demokrasi di Barat ditandai dengan lahirnya modernisme Barat diawali dengan empat faktor yang sangat dominan, **pertama** runtuhnya otoritas gereja sebagai legitimasi kekuatan *religius* atas persoalan-persoalan kekuasaan dan politik Roma, **kedua**, munculnya pemberontakan di beberapa wilayah Eropa seperti Italia, Inggris dan Prancis yang dipelopori oleh “Niccolo Machiavelli (1469-1527), yang didukung oleh kaum tertindas (*proletar* dari kaum *borjuis*), **ketiga** lahirnya istilah *Renaissance*, serta pengaruh abad pertengahan (476-1492 M) ilmu pengetahuan mulai merambah keseluruh Eropa, meskipun kondisi Barat dalam kegelapan¹⁰ **keempat**, munculnya filsafat modern yang dipelopori oleh Rene Descartes (1596-1650).

Seperti dikatakan Bertrand Russell “*History of Western Philosophy*” Priode Sejarah yang lazim disebut

⁸ *Ibid*,

⁹ *Ibid*, h. 232

¹⁰ Kegelapan dimaksud adalah masi terjadinya ortodoksi Gereja yang menganggap bahwa segala kehidupan ini ditentukan oleh Gereja sebagai perwakilan Tuhan di bumi, sehingga persoalan keilmuan acuannya adalah kitab suci, ketika Gali leo-gali lei mengatakan bahwa Dunia ini bulat kemudian mendapatkan hukuman berupa kematian, zaman inilah para intelektual Barat mengatakan terjadi zaman ketidak berdayaan ilmu atau zaman kegelapan.

modern mempunyai banyak perbedaan pandangan priode pertengahan¹¹ Gerakan renaissance memberi pondasi yang kokoh bagi munculnya abad pencerahan Eropa (XVIII), abad ini merupakan masa dimana gagasan-gagasan demokrasi menjadi perhatian khususnya para pemikir dan disiplin intelektual moral dan politik oleh pemikiran *renaissance* diasosiasikan dengan kekuasaan gereja.¹² terma ini merupakan langka awal terjadinya perubahan, apa yang disebut dengan keadilan dan kebersamaan tanpa ikatan teologi secara kaku, gerakan yang dipelopori oleh Marthin Luther¹³ (*the protestanisme*) itulah menjadi tonggak penting dalam perubahan peradaban Barat khususnya di Italia. Repormasi Protestan pada hakikatnya merupakan produk reinterpretasi terhadap doktrin Khatolik ortodoks, serta reaksi terhadap penyimpangan kekuasaan Gereja¹⁴

¹¹ Pertengahan diperkirakan pada abad 9-15 pada abad ini lazim disebut zaman filsafat skolastik, filsafat abad pertengahan juga disebut sebagai abad kegelapan yang merujuk dalam sejarah gereja, pada era ini agama menjadi objek kajian, disamping juga muncul istilah sekolastik Islam dan skolastik Kristen meskipun dikalangan Kristen belum mengenal filsafat. (Ali Maksum, *Pengantar Fislafat, dari masa Kalsik Hingga Post Modernisme*, (Jogyakarta Ar-Ruzz Media, 2009), h. 97

¹² Bertrand Russell, *History of Western Philosophy and its connection with political and social Circumstances from the Erliest Times to the Present Day*” terjamahannya *Sejarah Filsafat Barat* oleh, Sigit Jatmiko, Et,al,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), h. 646

¹³ Marthin Luther, Johannes Calvin, Zwing Knox dan sebagainya, merupakan gerakan awal pembaharuan (*renaissance*) dalam agama Kristen, meskipun pada awalnya gerakan ini hanyalah merupakan sebuah protes terhadap para pembesar di Jerman terhadap kekuasaan Imperium Khatolik di Roma (Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakrta Darul Falah, 1999), h. 110

¹⁴ *Ibid*, h.12

Disamping juga muncul beberapa tokoh modern lainnya seperti J.J. Rousseau, John Locke (1632-1704) Voltaire, Montesquieu (1689-1755) merereka inilah sebagai perintis lahirnya, demokrasi Barat yang dianut dewasa ini¹⁵ Disamping itu muncul pula faham humanisme, sebagai motipasi mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan. Rousseau dan John Locke, mermuskan teori kontrak sosial¹⁶ sedangkan, Montesquieu merumuskan teori *Trias Politica*, yang dikembangkan pada abad pencerahan merupakan suatu sumbangan besar bagi perkembangan gagasan demokrasi yakni *eksekutif, legis latif dan yudikatif*".

Pada perinsipnya teori itu menghendaki adanya pemisahan kekuasaan negara, kekuasaan negara tidak boleh tersentralisasi pada seorang penguasa yang berarti kekuasaan tidak boleh bersifat personal atau dikuasai oleh sebuah lembaga politik tertentu saja. Sebab bila demikian akan mudah terjadi penyelewengan kekuasaan dan pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan kebebasan politik rakyat¹⁷ mengingat pentingnya konsep ini sehingga beberapa Negara-negara maju telah menerapkan meskipun masih selalu

¹⁵ *Ibid*, h. 232

¹⁶ Teori kontrak sosial pertama, kedaulatan Negara bukanlah sesuatu yang "*taken for granted*" dan berasal dari Tuhan, pada dasarnya teori kontrak sosial merupakan suatu teori politik yang sepenuhnya bersifat sekuler, kedua, bahwa dunia dikuasai oleh Hukum yang timbul dari alam (nature) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal (berlaku bagi semua waktu dan golongan, seperti raja, dan rakyat jelata), ketiga, karena kekuasaan dan kedaulatan Negara berasal dari rakyat maka harus ada jaminan atas hak-hak individu dalam masyarakat, keempat, perlunya kontrak kekuasaan agar penguasa Negara tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, (lihat *Ibid*)

¹⁷ *Ibid*

melakukan inovasi-inovasi paradigma politik dan kekuasaan misalnya Amerika Serikat, Prancis dan beberapa negara berkembang termasuk Indonesia.

Perkembangan selanjutnya istilah demokrasi mulai mengalami perubahan dan bahkan mengalami pergeseran konsep dan paradigmanya, "Demokrasi seperti dikatakan di atas bukanlah konsep yang statis, sementara dalam abad XX terjadi perubahan mendasar mengenai orientasi negara demokrasi¹⁸ bahkan memiliki kecenderungan menuju demokrasi yang bersifat multikultural dan univesal. Gusdur misalnya menggagas demokrasi yang harus tunduk pada nilai-nilai lokalitas yang dimiliki bangsa¹⁹, ini menunjukkan bahwa arah demokrasi tidak lagi mempersoalkan masalah kepentingan sesaat, Gusdur kembali menegaskan, dalam alur demokrasi kehidupan berbangsa memberikan kedudukan yang sama bagi publik menjadi keharusan tanpa ada yang menang sendiri atau dipaksakan tunduk pada rezim tertentu²⁰ pemahaman tersebut merupakan bagian dari sikap Gusdur dalam memaknai isu-isu demokrasi.

Paradigma demokrasi dalam wacana multikulturalisme merupakan konsep kebinekaan yang senantiasa harus dikembangkan secara terus menerus hingga menemukan kesejatian demokrasi itu sendiri. Hingga akhirnya muncullah istilah-istilah demokrasi kontemporer seperti: kebebasan berpendapat (mimbar Bebas), Hak azasi manusia (HAM), Penegakan Hukum (mahkamah Konstitusi), keadilan konstitusi, Kesetaraan gender, peminisme, pluralisme agama, multikulturalisme, kearifan lokal pencegahan korupsi (KPK)

¹⁸ *Ibid*, h.235

¹⁹ Wasid, *Gusdur Sang Guru Bangsa*., h.142

²⁰ *Ibid*, h.143

dan sebagainya, meskipun sampai saat ini belum menemukan hakikat dan format demokrasi dalam wacana pluralisme dan multi kulturalisme yang damai. Sebenarnya konsep kedamaian merupakan dambaan setiap warga masyarakat, meskipun istilah demokrasi seringkali tereduksi dengan kondisi sosiokultural dalam masyarakat plural.

3. Prinsip-prinsip Demokrasi

Kalau kita mencermati sebenarnya konsep demokrasi tidak bisa berjalan begitu saja dalam suatu tatanan masyarakat yang maju dan berkembang tanpa memiliki prinsip sebagai landasan demokrasi, sebab prinsip merupakan bagian dari sikap dan karakter yang senantiasa dijadikan ukuran misalnya keterbukaan, kebersamaan, sikap saling memahami serta mendahulukan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.

Sadek, J. Sulaymân, menjelaskan bahwa dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Di antaranya:

- Kebebasan berbicara setiap warga negara. Dimaksud adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berbicara dan berpendapat berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku dalam sistem demokrasi misalnya mengeluarkan pendapat, mengkritik memberikan usulan dan sebagainya.
- Pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti. Berdasarkan undang-undang pemilihan umum yang harus diselenggarakan setiap lima tahun sekali sebagai bukti pelaksanaan demokrasi.

- Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas, suara mayoritas dimaksudkan adalah hasil pemilihan umum yang diwakili oleh DPR, sebagai perwakilan Rakyat ditingkat parlemen, namun suara minoritas adalah suara rakyat yang termarginalkan terhadap sistem kehidupan yang tidak berpihak seperti kemiskinan, pengangguran, buruh dan sebagainya.
- Peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat. Partai politik dimaksud adalah partai politik yang bisa memberikan jaminan terhadap keinginan dan menyalurkan aspirasinya, sebagai pemenang pemilihan umum, maupun tidak menang. penyaluran aspirasi lewat partai politik merupakan bentuk demokrasi yang sangat strategis terhadap pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan konstitusi.
- Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara untuk wujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*²¹.
- Supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum). Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh penguasa maupun rakyat, tidak terdapat kesewenang-

²¹<http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi> Penulis akses /9/April 2012

wenangan yang biasa dilakukan atas nama hukum, karena itu pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan²². Dalam sistem demokrasi tidak ada istilah kebal hukum, semua harus tunduk pada hukum, karenanya dalam supremasi hukum semuanya sama tidak ada perbedaan, hukumlah sebagai penentu.

- Semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu. Kemerdekanaan warga negara merupakan dambaan setiap orang, namun perlu difahami bahwa individu yang bebas tidak terikat dari belenggu, berbeda dengan kebebasan dan belenggu pada hewan atau makhluk lain, namun kebebasan dan belenggu adalah tidak adanya intimidasi, penindasan dan kekerasan namun berada dalam koridor hukum dan aturan-aturan yang telah disepakati secara demokrasi²³.

Dari sekian prinsip demokrasi semuanya mengarah kepada tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai warga negara yang diatur dalam sistem demokrasi yang berlaku secara universal. Dengan demikian akan tumbuhlah kesadaran masyarakat bahwa kebersaan dan keterbukaan akan menjadi aikon penting dalam era multikulturalisme.

4. Pengertian Pluralisme

²² ,<http://sejarah-dan-prinsip-demokrasi> penulis akses /9/April 2012,

²³ Uraian tentang prinsip-prinsip demokrasi di atas penulis kutip dari konsep “*trias politica Montesqui*” disamping juga berdasarakan bacaan dari beberapa literatur, seperti *Gusdur Sang Guru Bangsa, Pemikiran dan sikap Politik Gusdur, Jejak Langka Sang Guru Bangsa, dan Merebut Perbedaan membangun kebersamaan*. Banyak lagi yang lain memiliki signifikansi.

Pluralisme berasal dari kata pluralis yang berarti jamak, lebih dari satu, atau *pluralizing* sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu, atau lebih dari dua yang mempunyai dualis, sedangkan pluralisme sama dengan keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk bersangkutan dan sistem sosial, politiknya sebagai budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat²⁴ Pluralitas atau kemajemukan merupakan *sunnatullah*²⁵ Dalam istilah lain bahwa pluralisme adalah sama dengan doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan, pemerintahan disuatu negara harus dibagi-bagikan dan tidak dibenarkan adanya monopoli suatu golongan²⁶ dalam "*Ensiklopedi Exford adalah* suatu prinsip keagamaan yang merupakan secara psikologis memiliki perbedaan dengan berbagai macam perinsip²⁷ atau keyakinan.

Dalam kamus filsafat "Pluralisme dari bahasa latin pluralis (jamak)²⁸ dengan ciri; *pertama*, realitas fundamental bersifat jamak, berbeda dengan dualisme (yang menyatakan bahwa relitas fundamental ada dua) dan monisme menyatakan bahwa realitas fiundamental hanya satu. *kedua*, banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah tidak dapat direduksi pada dirinya secara independen, *ketiga*,

²⁴ Fuad Hasan *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Ke II (Jakarta, Balai Pustaka 1990), h.777

²⁵ Muhammad Imarah, *Islam Dan Pluralitas* , (Jakarta Gema Insani Pers. 1999),.h.31,

²⁶ Pringgo Digdo. *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta Kanisius, 1990), h.893

²⁷ The New Oxford, *Encyclopedie Diestionary*, Jilid 6 (Universality Exford, 1991), h.1297

²⁸ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta, Gramedia, 2006), h.

alam semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk, dan tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar, tidak ada tatanan koheren dan rasional fundamental.

Pluralisme dalam pandangan Islam, merupakan sikap menghargai dan toleransi kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan. Namun bukan berarti semua agama adalah sama, artinya tidak menganggap bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian sembah²⁹. Pluralisme adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap berbagai pemikiran termasuk keyakinan (religions) yang berbeda³⁰ sebab dengan perbedaan itulah kita akan temukan kemaha tunggalan. Perbedaan dalam memahami berbagai eksistensi merupakan bentuk paling sederhana dalam pluralitas berfikir manusia.

5. Sejarah pluralisme

Pada tahun 1875 berdiri sebuah organisasi Yahudi bernama *Theosophical Society* di New York dengan tujuan mengikat persaudaraan universal tanpa melihat kelompok, bangsa dan agama, di bawah pimpinan Helena Blavatsky³¹. Beberapa tahun kemudian organisasi ini mendirikan *International Head Quarters* di Adyar, Chennai India. Di bawah lambang *Theosophical Society*, tertulis sebuah

²⁹Keputusan Fatwa MUI Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Pluralisme menurut MUI www@yahoo.co.id di akses 18. Oktober 2010

³⁰ Ibid.

³¹ <http://www.com> Asal usul Pluralisme, di akses Maret 2011

komitmen “Tidak ada yang lebih tinggi dari agama selain kebenaran” tujuan perhimpunan *Theosofi Society* adalah : pertama. Mengadakan inti persaudaraan antara sesama manusia tanpa memandang bangsa, kepercayaan, kelamin, kaum atau warna kulit, kedua. Memajukan pelajaran dengan mencari persamaan dalam agama-agama, filsafat dan ilmu pengetahuan. ketiga. Menyelidiki hukum-hukum alam yang belum dapat di terangkan dan kekuatan-kekuatan dalam manusia yang masih terpendam³².

Gagasan Pluralisme masuk ke dalam wacana pemikiran Islam melalui tulisan Rene Guenon (1886-1851) dan diikuti oleh Frithjof Schoun. Kemudian dikembangkan Seyyed Hossein Nasr dalam *Preni philosophy*. Pada tahun 1912, Rene Guenon (Abdul Wahid Yahya setelah masuk Islam). menghidupkan kembali nilai-nilai, hikmah dan kebenaran abadi yang ada pada tradisi dan agama-agama disebutnya Tradisi Primordial (*Primordial Tradition*). walaupun setiap agama itu berbeda, tetapi semua agama itu memiliki tradisi yang sama³³. Secara historis bentuk kemajemukan (pluralis) sebenarnya suda ada dalam perjalanan agama-agama Ibrahim (*Abrahimic religious*) yang mengkisahkan tentang adanya pluralitas antara mereka yang beriman dan yang ingkar terhadap semua Rasul Tuhan³⁴ begitu juga dalam konteks Islam sejak Nabi berhijrah ke Madinah telah muncul persoalan pluralisme agama, dengan keberadaan kelompok ahl-kitab, disamping juga komunitas

³² *Ibid*

³³ www//.Com. *Pluralisme agama dalam berbagai pemikiran*, diakses 8 Maret 2012

³⁴ Phil.H.M.Nur. Kholis Setiawan, *Merajut Perbedaan Membangun Kebersamaan*, (Yogyakarta, Dialog Center Prss 2011), h. 70

kaum beriman, musyrik maupun kafir³⁵ Perbedaan teknis yang terdapat dalam setiap agama merupakan jalan dan cara yang berbeda untuk merealisasikan kebenaran.

Sebab semua agama itu mempunyai kebenaran yang terkandung dalam Tradisi Primordial. Kesatuan agama dalam tingkat bathin inilah yang disebut “kesatuan agama pada tingkat transedent (*trancedent unity of religion*). Selanjutnya pemikiran Schoun dikembangkan oleh Seyyed Hossein Nasr. Hakikat suatu agama, Seperti Islam dan Kristen, sebagaimana wujudnya dalam sejarahnya, tidak lain sesuatu yang tertulis dalam model dasarnya di alam ideal.

Dengan demikian, pluralisme Agama merupakan “kehendak Tuhan” dan sebagai akibatnya semua agama benar berdasarkan syareatnya masing-masing. Di samping itu pluralisme agama sebagai bingkai dalam memahami berbagai bentuk pemikiran, pandangan, meskipun sering dijadikan konflik politik lebih sering terjadi pada tataran individu atau kelompok³⁶. Menurut Gusdur bahwa, jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing atas sikap saling hormat-menghormati, yang mendorong tumbuhnya sikap tenggang rasa dan saling pengertian³⁷.

Sementara dari pandangan Islam, kemajemukan adalah *sunnatullah* (hukum alam). Masyarakat yang majemuk ini tentu saja memiliki budaya dan aspirasi yang beraneka

³⁵ Ahmad Syafi'i Ma'rif, 1998) h.151

³⁶ Robbert N Bellah dan Phillip E. Hammond, *Beragama Bentuk Agama Sivil dalam Beragam Bentuk Kekuasaan Politik, Kultural, Ekonomi dan sosial*, Tth, 212.

³⁷ Budhi Munawar Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina), h. 546

ragam, tetapi mereka seharusnya memiliki kedudukan yang sama, tidak ada superioritas antara satu suku, etnis atau kelompok sosial dengan lainnya. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Namun kadang-kadang perbedaan ini menimbulkan konflik di antara mereka. Maka sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan ini dimunculkan konsep atau paham kemajemukan (*pluralisme*)³⁸ Kaitannya dengan bergulirnya arus globalisasi yang merambah dalam seluruh sistem termasuk dalam agama Islam (*the muslims religion*) itu sendiri, sehingga konsep pluralisme menjadi terma penting dalam berbagai diskursus (*theology of religions*) dan perkembangan politik, demokrasi saat ini.

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, kaya akan khazanah sosial, kebudayaan menyimpan potensi³⁹ untuk berdamai dan bergandengan tangan sebagai wujud anugrah Tuhan (*sumnatullah*). Persoalan yang muncul dalam masyarakat terkait dengan sikap arogansi dan merasa benar sendiri dalam sebuah keyakinan sehingga melahirkan permusuhan dan kebencian yang berkepanjangan, pemahaman inilah mendorong para intelektual dari berbagai latar belakang membicarakan persoalan keanekaragaman makhluk Tuhan termasuk teologi.

Jika dilihat dari aspek sejarah perkembangan pluralitas agama yang begitu pesat, maka tidak heran jika

³⁸ Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Kompas, 2001), h.11-12.

³⁹ Greg Fealy, Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal*, Ahmad Suaedy, A. Made Tonny Supriatna, Amiruddin Ar-Rany, dkk. (terj), (Yogyakarta: LKIS, 1997), h. 204

para pakar studi agama biasa menyebut era pluralisme”. Meskipun dibalik ungkapan ini terkandung maksud betapa sulit untuk mempertahankan paradigma tunggal dalam wacana apapun, sebab semuanya serba beraneka ragam⁴⁰ hal ini dikemukakan oleh Harold Coward, bahwa pluralitas agama merupakan ciri yang sangat *empirical* dalam kehidupan dunia⁴¹ dengan demikian lahirlah berbagai solusi sebagai manifestasi kesadaran beragama misalnya dialog antar agama, diskusi terbuka dan saling kerja sama dalam bentuk perdamaian, dan sebagainya.

6. Dasar-dasar Pluralisme Dalam Islam

Menurut Amin Abdullah, dalam konteks keIndonesiaan terlepas dari sejarah besar pluralisme. Kerukunan antar umat beragama sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi bangsa yang majemuk dalam hal agama seperti halnya di Indonesia. Keanekaragaman (pluralisme) agama yang hidup di Indonesia termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh interen umat beragama adalah merupakan kenyataan historis⁴². Oleh karenanya memerlukan sikap dan perilaku yang arif dan bijak bahwa dalam setiap perbedaan ada hikmah yang terkandung didalamnya tentu tidak bisa dipaksakan sebagaimana dalam (QS. *al-Baqarah* 2: 256) “Tidak ada

⁴⁰ M.Amin Abdullah, *Falsafah Kalam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1994), h.104

⁴¹ Harold Coward, *Pluralisme Bagi Agama-agama*, (Yogyakarta Kanisius, 1984), 167 Penulis kutip dari “*Merajut Perbedaan Membangaun Kebersamaan*,...1)

⁴²Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), h. 5

paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah..

Ayat di atas sebenarnya mengajarkan bahwa Allah telah menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, atau lebih tegasnya mana agama yang benar dan mana agama yang tidak benar (yang dalam al-Qur'an disebut ajaran thagut). Sesungguhnya misi Islam yang paling besar adalah pembebasan. Dalam artian manusia memiliki insting dan hati nurani untuk membedakan kebenaran teologi yang di yakini.

Disamping itu (*QS. Al-Zumar 39:6*) "bahwa asal mula manusia berasal dari dzat yang satu terimplikasi secara esensi dalam perbedaan yang ada pada manusia karenanya, agama yang didasarkan pada pesan ke-Esaan Tuhan tidak dapat dikatakan hanya diberikan atau ditujukan kepada satu kelompok manusia⁴³, melainkan kepada seluruh makhluknya. Keragaman ras, bangsa dan suku menandakan adanya perbedaan secara empirik. Alquran di satu sisi menegaskan, bagi setiap umat Kami utus Rasul (*QS.Yunus 10:48*) dan (*QS.Al-Maidah 5: 48*). Masing-masing memberikan pandangan secara universal bahwa keragaman agama merupakan bagian dari strategi Allah menjadikan manusia untuk saling bersinergi. Dan saling berkasih sayang (*QS.Thahaa 20: 88*) "*Tuhan kami dan Tuhan kamu sungguh adalah Allah Tuhan yang Esa*" dalam ayat ini, sangat jelas pengakuan Islam bahwa Tuhan yang mereka yakini (") adalah Allah yang sama dengan Islam dilihat dari segi

⁴³Quris Shihab, *TafsirAl-Misbah Jilid 1-15*, kemudian Liaht juga Al-Qur'an dan terjamhnya, terbitan Departemen agama, kemudian, QS. al-Baqarah: 256, *QS. Al-Zumar 39:6*, *QS.Yunus 10:48*,

*esoteric*⁴⁴ keyakinan masing-masing. Juga dalam (QS. Al-Baqarah 2 :285) "*beriman kepada Allah, para malaikat-Nya wahyu-wahyu-Nya dan nabi-nabi-Nya tidak membedakan nabi Allah yang satu dengan yang lain.*

Meskipun orang-orang yahudi dan Kristen selalu mengklaim diri mereka memiliki nabi dan keturunan yang baik khusus kepada umatnya namun Allah swt, menegaskan dalam Alquran (QS.Al-Imran 3 :84), (QS.An-Nisa 4:163), (QS.Al-Imran 3:2-3) (QS.al-Nahl 16:36) "*Sungguh Allah yang hidup dan abadi yang mewahyukan kepada Muhammad kitab Alquran yang mengukuhkan wahyu-wahyu sebelumnya, dialah yang mewahyukan Taurat dan Injil*" (QS. Almaidah 5:69) "*Mereka yang beriman kepadamu, Muhammad, Yahudi, Kristen dan Majusi semua yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan berbuat kebaikan akan menerima pahala dari Allah tak ada jalan bagi mereka untuk takut, mereka pun tak akan berduka.*

Sesungguhnya telah kami bangkitkan dalam setiap umat (golongan manusia) seorang Rasul (dengan pesan) (wahai umatku) sembahlah olehmu sekalian Allah Tuhan yang maha Esa dan jauhilah Thaghut, dari antara mereka (umat itu) ada yang diberi petunjuk Allah dan dari mereka ada yang jelas menempu kesesatan, karena itu mengembaralah kamu sekalian dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat mereka yang mendustakan

⁴⁴*Esetoric*, menurut Seyyed Hossein Nasr diartikan sebagai hakekat masing-masing agama, sebagai puncak kesucian dalam tingkatan spiritual yang tinggi, atau disebut makna agama bersipat batin (Puad Hasan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jilid V, (Jakarta PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), h.46

(kepada rasul) itu⁴⁵ begitu juga "(QS. *al-Nisa* :5.163-165) tentang manusia sebagai umat yang tunggal⁴⁶

Dalam (QS. *Al-Ankabut* 29:46) "*Kami telah beriman kepada kitab-kitabn yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada-mu ; Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri*" berserah diri menunjukkan bahwa semuanya tunduk dan taat kepada Allah sebagai Tuhan dari seluruh keragaman. (QS.*Almaidah* :5.48) Kalau Tuhan mau dengan satu dekrit semuanya bertekuk lutut, semuanya akan menyatakan keimanannya kepada Allah swt⁴⁷.

⁴⁵Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1999),h. 122-123

⁴⁶*Semula Manusia umat yang tunggal, kemudian Allah mengutus para Nabi yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan, dan Dia menurunkan bersama para nabi itu kitab suci untuk menjadi pedoman bagi manusia, berkenaan dengan hal-hal yang mereka perselisihkan, dan tidaklah berselisih tentang hal itu kecuali mereka yang telah menerima kitab suci sesudah datang kepada mereka bebrbagai keterangan, karena persaingan di antara mereka, kemudian Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya kearah jalan yang lurus QS. Al-Baqarah 2: 213.*

⁴⁷ Dalam pandangan Islam, Alquran memiliki pesan keagamaan yang harus dijadikan rujukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pandangan ini mengacu kepada sebuah al-Hadis sering dikutip , *al-dinu an-nashihah*" agama adalah Nasihat, agama adalah sebuah pesan. Pesan keagamaan, yang merupakan pokok pandangan hidup bagi umat Islam, dan mereka yang mengikuti Kitab suci sebelumnya, yaitu pesan untuk bertakwa kepada Allah, dan sungguh telah kami perintahkan kepada mereka, ahlikitab sebelum kamu, juga kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah, bahwa tujuan agama yang diciptakan Allah supaya dijadikan rujukan (lihat Budy Munawar Rahman,..., h.117)

Dari sekian ayat penulis kemukakan semuanya menunjukkan sikap toleransi yang amat normative terhadap pluralisme agama.

Pluralisme dan Demokrasi

Mencermati makna demokrasi dan pluralisme ibarat mata uang dua sisi yang selalu berbawaan, misalnya disatu sisi berorientasi pada keadilan, keadilantraan dan kebersamaan, sementara disisi lain dituntut suatu sikap toleransi secara teologis dan normatif, yang didasari dengan keyakinan dan dan keinginan yang berbeda. Dalam wacana kekinian makna demokrasi dan toleransi sering mendapatkan tantangan baik dikalangan masyarakat intelketual, akademis religius maupun dikalangan awam konserpatif religius.

Ketegangan dan ketidak seimbangan pemaknaan antara kedua mainsterm tersebut selalu diasosiaikan dengan gerakan-gerakan liberalis Barat modern, sehingga tidak sedikit kendala bahkan membutuhkan waktu untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang menganggap, demokrasi dan pluralisme sesuatu yang mustahil berada pada suatu keyakinan dan orientasi yang berbeda, misalnya sebua pandangan mengatakan, demokrasi merupakan kekuasaan legislatif secara mutlak berada di tangan rakyat, sementara pluralisme merupakan wewenang Allah, yang menciptakan perbedaan⁴⁸(pluralitas).

Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad

⁴⁸ <http://www.com> *Demokrasi dalam Islam*, penulis akses 20 Maret 2012

untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syâri' (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqih (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya⁴⁹. itulah sebabnya demokrasi dan pluralisme berpulang pada pandangan dan tujuan menghubungkan manusia dengan Tuhan melalui keadilan dan kebersamaan dalam wacana multi kultural teologi. Menurut Aristoteles, Tuhan menciptakan alam dalam segala perbedaannya perlu difahami secara bijak bahwa dibalik perbedaan pasti memiliki hikmah. Persoalan Demokrasi, Pluralisme dan multikulturalisme merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh agama-agama yang ada didunia sekarang ini⁵⁰ olehnya itu memerlukan konsep dan pemahaman yang lebih konprehensif terkait dengan makna demokrasi dan Pluralisme dalam wacana masyarakat modern dan global.

Seperti dijelaskan Zainal Arifin Thoha, Sebenarnya demokrasi yang diinginkan oleh Gusdur adalah demokrasi yang beroperasi dalam kenyataan kemajemukan masyarakat, yaitu adanya berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda bahkan bertentangan sekalipun, baik yang berdasarkan suku, agama keyakinan, kepentingan maupun pengelompokan dengan dasar lainnya, yang sama-sama berhak untuk dipertimbangkan aspirasinya dalam mengambil keputusan politik⁵¹ Seiring dengan pemikiran Gusdur dalam

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Thoha Hamim, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, (Surabaya IAIN Sunan Ampel Press, 2007), h.117

⁵¹ Zainal Arifin Thoha, *Gusdur, NU dan Demokrasi dalam membangun budaya kerakyatan* h. 143, penulis Kutip dari "Ali Maskur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gusdur*, (Jakarta, Erlangga, 2010),h. 115

perkembangan demokrasi di Indonesia namun nilai-nilai pluralisme selalu menjadi bagian dari demokrasi, “Gusdur dengan konsisten mengembangkan demokrasi dan pluralisme tidak saja dalam lingkungan eksternal kehidupan kebangsaan melainkan juga dalam lingkungan internal NU⁵².

Terma Demokrasi dan Pluralisme merupakan sebuah realitas yang tidak bisa dihindari, sebab dua konsep ini pasti selalu beriringan sehingga memerlukan epistemologi dalam rangkain pengembangan istilah tersebut ditengah-tengah masyarakat yang multikultural dimensional plural.

Pluralitas bangsa Indonesia harus berjalan seiring dengan demokrasi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai persamaan dan kebebasan. Dengan demokrasi masing-masing komunitas dapat mengembangkan kreatifitas dan belajar untuk menyamakan pandangan serta bersikap dewasa dalam berbeda pendapat⁵³ karena itu perlu dilakukan upaya saling memahami dalam konteks kedewasaan demokrasi dalam bingkai pluralitas. Sehingga persepsi dan pandangan terhadap konsep demokrasi yang pluralitas, bukan berarti bertujuan menyamakan paradigma teologi dalam bentuk transendental, melainkan berusaha dan bersikap dewasa dan terbuka (*inklusif*) dalam memaknai eksistensi kehidupan yang beragam.

Eksistensi negara demokrasi sebenarnya menghendaki adanya sikap kebebasan, terbuka yang terbingkai dengan nilai-nilai pluralitas, dimana di dalamnya memiliki beragam keinginan dan kepentingan yang saling memberikan kesempatan dalam arti memiliki komitmen kepercayaan dan kejujuran serta moral yang tinggi yang berdasarkan dengan

⁵²Ali Maskur Musa, *Pemikiran...*

⁵³*Ibid*, h.112

nilai-nilai religius dan normatifitas yang tinggi. Dengan demikian akan lebih memudahkan masyarakat untuk memahami ekistensinya dihadapan Tuhan, bahkan dihadapn pemimipinnya, sebab di dalamnya ada saling pengertain dan keterbukaan bahwa kehidupan ini ada hak orang lain yang perlu direspon secara konstruktif.

Negara atau bangsa yang berada pada konsep pemahaman semacam itu akan semakin maju dan sejahtera dan semakin berkembang. Prespektif ini sebenarnya telah terjadi di zaman Nabi Sulaiman” ketika berkomunikasi dengan seluruh Makhluk, termasuk bangsa semut⁵⁴ kemudian dizaman Rasulullah Saw, ketika di Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan budaya bahkan keyakinan namun nabi berhasil menyatukan hingga menjadi sebuah kekuatan yang penuh dengan kedamian. Sebenarnya konsep demokrasi dan pluralisme tidak bisa dihindari sebab keduanya telah berjalan secara *sunnatullah*. Dalam kaitan inilah kita harus menyadari perlunya membangun paradigma ingklusifisme⁵⁴. Historisitas tersebut memberikan isyarat

⁵⁴Bangsa Semut (*QS.An-Namal 27:18*) Dijelaskan bahwa ketika Nabi Sulaiman lewat lalu bangsa semut memberikan perintah kepada masyarakatnya, supaya berlindung didalam lubang-lubang mereka kemudian Nabi Sulaiman mendengarkan dan mengehtikan langkah pasukanya lalu mempersilahkan bangsa semut hingga tidak ada satupun yang terinjak, disamping itu Nabi sulaiamn juga memerintakhakan kepada seluruh makhluk supaya menegakakan kebenaran dan keadilan tanpa pandangan bulu dan latar belakang, terlihat ketika seorang ibu menangis supaya diberikan kedilan terhadap seorang bayi kecil, bahwa siapa ibu yang sebenarnya memiliki bayi itu.

⁵⁴ Ingklusifisme, adalah sebuah konsep yang muncul dizaman modern sebagai akibat dari sikap eksklusifisme atau faham tertutupan, dalam pandangan Alwi Shihab, bahwa sikap Ingklusifisme merupakan sebuah sikap keterbukan yang menerima semua pandangan, bukan berarti

bahwa betapa indahnyanya ketika saling pengertian dan keterbukaan, maka kehidupan ini semakin bermakna bahwa dalam hidup ini ternyata kita tidak sendirian

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999)
- _____. *Falsafah Kalam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1994)
- Ahmad, Nur. (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Kompas, 2001)
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat* (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Coward, Horald. *Pluralisme Bagi Agama-agama*, (Yogyakarta Kanisius, 1984)
- Digdo, Pringgo. *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta Kanisius, 1990)
- Fealy, Greg, Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal*, Ahmad Suaedy, A. Made Tonny Supriatna, Amiruddin Ar-Rany, dkk. (terj), (Yogyakarta: LKIS, 1997)

menyakini semua atau mengimani semua agama, bahwa dalam masing-masing agama ada nilai-nilai ilahi yang harus difahami oleh pemeluknya sendiri. (Lihat, Alwi Shihab *Islam dan Inkklusifisme* dan lihat juga, Hamka Haq *Damai Ajaran semua Agama* Makassar Al-Ahkam, 2004), 198

- H.M.Nur, Phil. Kholis Setiawan, *Merajut Perbedaan Membangun Kebersamaan*, (Yogyakarta, Dialog Center Prss 2011)
- Hamim, Thoha. *Resolusi Koflik Islam Indonesia*, (Surabaya IAIN Sunan Ampel Press, 2007)
- Hasan,Fuad. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Ke II (Jakarta, Balai Pustaka 1990)
- <http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/9/4/2012>
- <http://sejarah-dan-prinsip-demokrasi/9/4/2012>,
- <http://www.com> *Asal usul Pluralisme*, Maret 2011
- <http://www.com> *Demokrasi dalam Islam*, 9 Maret 2012
- Imarah, Muhammad. *Islam Dan Pluralitas* , (Jakarat Gema Insani Pers. 1999)
- Keputusan Fatwa MUI Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan SekularismePluralisme menurut MUI www@Yahoo.co.id tanggal 18. Oktober 2010*
- Maksum, Ali. *Pengantar Fislafat, dari masa Kalsik Hingga Post Modernisme*, (Jogyakarta Ar-Ruzz Media, 2009)
- Maskur Musa, Ali. dalam judul *Pemikiran dan Sikap Politik Gusdur*, (Jakarta, Erlangga, 2010)
- Munawar Rachman, Budhi. (ed.), *Kontekstualisasi Diktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina)
- N.Bellah,Robbert. dan Phillip E. Hammond, *Beragama Bentuk Agama Sipil dalam Beragam Bentuk Kekuasaan Politik, Kultural, Ekonomi dan sosial*, (Tth),
- Nadroh, Siti *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1999)

- Rowe & Schofield *Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi, (Cambridge University Press)*Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Russell, Bertrand. *History of Western Philosophy and its connection with political and social Circumstances from the Erliest Times to the Present Day*” terjemahannya *Sejarah Filsafat Barat* oleh, Sigit Jatmiko, Et.al,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007)
- Shihab, Qurish *Tafsir Al-Misbah Jilid 1-15*,
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta Darul Falah, 1999)
- The New Oxford, *Encyclopedie Diestionary*, Jilid 6 (Universality Exford, 1991)
- Wasid, *Gusdur Sang Guru Bangsa, Pergolakan Islam Kemanusiaan dan Kebangsaan*, (Yogyakarta, Interpena, 2010)